

# KOS KRISIS CENTER SEBAGAI MODEL MANAJEMEN KESEJAHTERAAN SOSIAL PELAJAR DAN MAHASISWA DI YOGYAKARTA

Sugiyanto<sup>1</sup>

## Abstrak

*Salah satu keistimewaan DIY adalah adanya kenyataan kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Berbagai lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi banyak berdiri di wilayah ini. Pendidikan adalah panglima pembangunan dan investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumberdaya pembangunan dalam menghadapi berbagai krisis di berbagai bidang. Sejarah telah membuktikan bahwa peran Kerajaan/ kraton dengan model kepemimpinan monarki mempunyai visi yang tinggi mebelas dan mencerdaskan rakyatnya. KCC sebagai salah satu organisasi social yang telah berupaya membantu mewujudkan kesejahteraan para pelajar dan mahasiswa yang*

---

<sup>1</sup> STPMD "APMD"

*berorientasi pada harmonisasi nasionalisme. KCC berupaya mencegah terjadinya disfungsi sosial anak kos dalam kehidupan sehari-hari. KCC siap menjadi jembatan antara anak kos dengan masyarakat setempat. Kegiatan –kegiatan KCC merupakan inti perwujudan manajemen kesejahteraan sosial anak kos di Yogyakarta.*

## **A. Pendahuluan**

Bertolak dari pendekatan sejarah dan politik Yogyakarta memiliki nilai pembentuk pusat pendidikan, sehingga masyarakat memberi *trust* dan kerelaan bahwa Yogyakarta sejak berdirinya kerajaan Mataram menjadi pusat belajar masyarakat. Menurut Bambang Soewondo (1977:140) pendidikan di Yogyakarta dimulai sejak abad 18 dan diselenggarakan di sekitar kerajaan/kraton, proses pendidikan terselenggara atas ijin dan bantuan pihak kerajaan. Salah satu aspek positif dari masa penjajahan Belanda dan Jepang mereka banyak merintis sekolah yang awalnya untuk kepentingan negeri penjajah tetapi sebagian warga Indonesia khususnya masyarakat Yogyakarta juga mendapat kesempatan mengikuti pendidikan tersebut. Setelah Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, sekolah-sekolah peninggalan Belanda dan Jepang diteruskan oleh pemerintah dan masyarakat. Menjelang Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 di Jakarta didirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) pada tanggal 27 Rajab 1364H atau bertepatan tanggal 8 Juli 1945, yang didirikan oleh tokoh nasional Dr. Moh. Hatta, Moh. Natsir, Prof. KHA. Moh. Roem, KH. Wahid Hasyim, dll. Perguruan Tinggi (PT) ini merupakan wujud cita-cita tokoh nasional Indonesia yang melihat kenyataan bahwa PT pada waktu itu semuanya milik Belanda. Karena situasi politik Kota RI dari Jakarta hijrah ke Yogyakarta STI pun ikut hijrah dan diresmikan kembali oleh Presiden Soekarno tanggal 27 Rajab 1365H atau bertepatan tanggal 10 April 1946 di nDalem Pangulon Yogyakarta dan diubah namanya menjadi Universitas Islam Indonesia (UII), Situasi pendidikan di Yogyakarta pasca kemerdekaan RI 1945 melanjutkan sekolah-sekolah atas bentukan penjajah Belanda dan Jepang, sehingga sekolah-sekolah tersebut dikelola baik oleh pemerintah

maupun masyarakat, tepat pada tanggal 3 Maret 1946 diumumkan-nya berdirinya Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada di gedung KNI Malioboro. Ditambah dengan penetapan pemerintah terhadap Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantoro lahir di Yogyakarta dan mendirikan beberapa sekolah di Yogyakarta. Sejak berdirinya UGM di Yogyakarta disusul beberapa perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi kedinasan lain serta sekolah menengah, sekolah kejuruan dan sekolah dasar serta lembaga pendidikan non formal.

Yogyakarta sebagai kota pendidikan dipertegas para stakeholder dari berbagai institusi dan personal yang telah memberikan statementnya diantaranya: 1). Sri Sultan HB X (2004:11) dalam Yogyakarta *in Corparated* menyatakan bahwa "Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota budaya dan kota pariwisata"., 2). Peraturaturan Pemerintah DIY Nomor 6 Tahun 2003 : Tentang Rencana Strategis Daerah DIY 2004-2008 dalam visi dan misi kota Yogyakarta tersirat "Terwujudnya pembangunan regional sebagai wahana menuju pada kondisi DIY pada tahun 2020 sebagai pusat pendidikan, pusat budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka., 3). Supardi (2003:15), Gerakan Yogyakarta kota pendidikan dan taman pintar pendidikan., 4). Gunawan (2003:11), Yogyakarta sebagai kota pendidikan adalah komitmen *stakeholders* dan public, dalam hal ini Gunawan menegaskan komitmen adalah hak periogratif individu yang tidak dapat dikendalikan dengan cara apapun dari luar individu yang bersangkutan, dan komitmen dapat diharapkan tetapi tidak dapat direncanakan., 5). APTISI Wilayah V Yogyakarta, mempertahankan Yogyakarta sebagai kota pendidikan perlu investasi besar, kebijakan pemerintah bersama DPRD dengan melibatkan sekolah dan kampus., 6). Pernyataan Suyanto dalam pidato pengkuhan guru besar, pendidikan sebagai tolak ukur atau indikator segala aspek kehidupan, maka pendidikan sebagai panglima pembangunan dan investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumberdaya pembangunan maka untuk mengatasi krisis diperlukan orang terdidik. Dan di Kopertis Wilayah V Yogyakarta terdapat 122 PTS dan 7 PTN termasuk kedinasan, dengan program studi lebih dari 300. Jumlah sekolah dasar sampai menengah 379 institusi tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota. 7). Dalam kisah sukses para pejabat negara atau pelaku wirasusaha

yang saat ini tidak tinggal di Yogyakarta dan masa mudanya mengenyam pendidikan di Yogyakarta, mereka masih memiliki rasa emosional dengan suasana Yogyakarta maka anak cucu mereka cenderung mereka kirim untuk belajar di Yogyakarta, menurut pendapat mereka Yogyakarta relative aman, murah dan budaya sopan santun dengan nuansa multicultural sangat melekat dan mendukung studi anak cucunya. Tujuh alasan di atas menyakinkan publik sebagai identitas Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang penuh dengan berbagai fasilitas pendidikan dengan nuansa unik karena didukung oleh situasi kehidupan keraton yang memiliki kontribusi besar terhadap sejarah perjuangan kemerdekaan dan pendidikan secara nasional.

Disisi lain Yogyakarta memiliki beberapa pusat dan media pembelajaran yang berbeda dengan kota lain , antara lain media pembelajaran peninggalan sejarah mapun yang diciptakan baru oleh pemerintah bersama masyarakat, misalnya Candi Prambanan dan candi-candi lain, berbagai Musium, Taman Pintar, Malboro, Radio Anak, berbagai Pabrik, Rumah Pemulihan Gizi (RPG), Griya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Griya UMKM), Kebun Binatang, pasar tradisional yang unik (pasar sentir, pasar lowak, pasar barang bekas, pasar hewan), gunung merapi teraktif di dunia, pantai, dan lain sebagainya. Budi Santoso WS (2009:2) mempertegas bahwa tipikal pendidikan di Yogyakarta memiliki Integritas dan intelektual, *Melting pot* suku bangsa di Indonesia, Sperit nasionalisme, wawasan kebangsaan (KH. Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantoro, Sri Sultan HB IX, Prof. Sardjito, Prof Kusnadi Harjosumantri). Berpijak dari sperit pendidikan dan sejarah itulah makna pendidikan dalam Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 diberbunyi "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara" dapat dengan mudah dapat diwujudkan sehingga fungsi pendidikan dalam membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat berbasis

potensi Yogyakarta dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu pendidikan di Yogyakarta menjadi salah satu unsur keistimewaan.

Unsur-unsur penguat keistimewaan Yogyakarta sebagai salah satu Daerah Istimewa telah memenuhi unsur-unsur pembentuk identitas menurut Sobirin (2010:12) ada tiga unsur pembentuk identitas, yaitu kekhasan, kesamaan dan pembeda. Pertanyaan yang dapat diangkat dari sini antara lain : apa yang menjadi kekhasan Yogyakarta?., apa kesamaan Yogyakarta dengan wilayah/propinsi lain? dan apa yang menjadi pembeda Yogyakarta dengan kota/wilayah/propinsi lain. Jawaban atas pertanyaan di atas dapat dipelajari pada tabel 1.

**Tabel 1**  
**Unsur Pembentuk Identitas Yogyakarta<sup>2</sup>**

<b>Indikator</b>	<b>Pemerintah</b>	<b>Masyarakat</b>	<b>Pemimpin</b>
Kekhasan	<p>an</p> <p>Berawal dari dua kerajaan dengan system monarki beradaptasi ke system presidential bergabung dengan RI , Gubernur adalah raja</p>	<p>Unik dan khas, menjunjung tinggi :</p> <p>Kenyakinan tentang kesadaran (awareness)</p> <p>Kebijakan (wisdom)</p> <p>Kesatuan seluruh umat (unity of mankind)</p>	<p>Selalu dari keluarga kerajaan/raja. Penetapan, prinsip Niti Projo. Sebagai wali</p>
Pembeda	<p>Menyatukan keragaman Kewenangan</p>	<p>Tidak memiliki hak untuk menjadi Gubernur dan wakil Gubernur</p> <p><i>Selling point</i></p>	<p>Tidak pemilihan Tidak mengisap rakyat</p> <p>Sering melakukan penyamaran dalam arti positif</p>
Kesamaan	<p>Kewenangan dan hak yang sama</p>	<p>Hak dipilih dan memilih, kecuali menjadi Gubernur dan wakil Gubernur</p>	<p>Jabatannya sama sebagai gubernur dan wakil gubernur lain</p>

<sup>2</sup> Unsur pembentuk identitas perihal pimpinan daerah/gubernur saat ini sedang diproses di DPR RI tentang undang-undang keistimewaan Yogyakarta.

Ketiga aktor pemerintah, masyarakat dan pemimpin telah terintegrasi untuk berkontribusi dalam memperkuat posisi Yogyakarta sebagai Kota pendidikan, sehingga tabel di atas membuktikan bahwa Yogyakarta memiliki identitas keistimewaan, kekhasan yang unik dan memiliki kesamaan dengan propinsi lain dalam wadah NKRI. 1). *Characteristic identify* (kekhasan), yang mengkrystal menjadi *legal identity* (maklumat 5 September 1945, dll)., 2. *Causal Identify*, kearifan local dari pemimpin (niti projo artinya Raja adalah wali dari rakyat, penetapan Gubernur dan wakil sebagai wakil Gubernur ), dan masyarakatnya yang unik dan khas mengutamakan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya local dan kearifan seperti *mikul duwur mendem jero*, Dalam memimpin pemerintahan Sultan selalu berpihak kepada wong cilik/rakyat, salah satu kutipan Sri Sultan HB X pada 1 Mei 2000 : saya harus membentuk jati diri untuk tumbuh dan mengembangkan wawasan untuk keberpihakan itu sendiri sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan. keberpihakan kepada rakyat adalah panggilan nurani yang harus diwujudkan kedalam laku atau tindakan, sehingga masyarakat harus mengetahui setiap gerak langkah Sri Sultan HB X dalam membentuk jati diri dan rakyat diberi kesempatan untuk melihat apakah benar atau tidak, mampu atau tidak, sependapat atau tidak dll., 3. Bukti kuat *Legal identify* Sultan tidak saja diterima kalangan masyarakat Jawa tetapi diterima ditingkat nasional "Identitas sultan adalah raja orang jawa, tetapi sultan milik nasional permata hati bangsa, muncul karena pribadi. pluralime budaya (kemajemukan adalah karunia). Sultan sebagai narasi besar Yogyakarta dan orang Jawa" . 4. *Inditying Character* selalu melekat nama Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dengan nama pemimpin Raja sekaligus Gubernur, karena di Yogyakarta memiliki ke-aslian, ke-lokal-an, ke-unik-an yang tidak dimiliki daerah lain (Kraton-Malioboro-Tugu) memiliki makna sejarah, menjadi bergantungnya ratusan ribu mengaes rejeki, 5). *Multiple Identify*, Yogyakarta menjadi *leading sector* apa maunya pejabat diubah apa maunya rakyat. Menurut Ali Imran, (3:1990-1991) Alquran berisi tanda-tanda-rambu-rambu, dalam terminology keislaman setiap makhluk hidup memiliki kekhasan sendiri-sendiri dalam memaknai atau menafsirkan tanda-tanda. ini menjadi hukum

ketetapan (sunnatullah) perbedaan suku, agama, ras, warna kulit, bangsa, bahasa, dan lainnya menjadi ruh bangunan kesitimewaan Yogyakarta sebagai identify : a). Historisitas, peran sejarah yang dimainkan oleh Sultan Agung Hayokrokusumo dan Sri Sultan HB IX perjuangan yang menghantarkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan, Sri Sultan X dalam situasi Indonesia krisis kepemimpinan selalu menjadi poros untuk berunding seperti Habibi, Gusdur, Mega., b). Intelektualitas, Yogyakarta sebagai mata air pemikir tanah air, memiliki empat PT yang berwibawa UGM-UNY, UII, UIN keempat ini melahirkan tokoh pemimpin pejuang nasional., c). Pluralitas, sebagai kota pendidikan dan budaya di dalamnya kumpulan pemuda pelajar dari berbagai daerah yang memiliki perbedaan : suku, agama, ras, budaya, dan beda latarbelakang keturunan, pendidikan, serta ekonominya, tetapi DIY mampu mengelola Pluralitas/miniaturnya Indonesia., d). Keberpihakan Gubernur kepada rakyat kecil merupakan bagian sikap yang menjadi panutan.

Selanjutnya para pemimpin Yogyakarta dalam melaksanakan pembangunan selalu berpijak pada filosofi pembangunan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Dasar filosofi yang lain adalah *Hamangku-Hamengku-Hamengkoni*, Tahta Untuk Rakyat, dan Tahta untuk Kesejahteraan Sosial-kultural. Konsep falsafah sebagai tonggak berdirinya Mataram Islam, sejak Demak – Jipang – Pajang hingga Panembahan Senopati – Prabu Hanyakrawati - Sultan Agung – Amangkurat - Paku Buwono – Hamengku Buwono – Paku Alam – Mangkunegara mengacu prinsip tauhid “wihdatil wujud – wushul wujud” yang dikemas dalam bahasa simbol: “*Sangkan Paraning Dumadi Manunggaling Kawula lan Gusti*”.

Sugiyanto(2004:31), sebagai kota pendidikan maka penduduk kota Yogyakarta didominasi oleh pelajar dan mahasiswa, jumlah pelajar dan mahasiswa di Yogyakarta menjadi faktor penarik bagi pelaku usaha baik pelaku usaha berskala besar dalam bentuk membuat kos-kosan sebagai rumah tinggal sementara, fasilitas public seperti tempat-rekreasi dan olah raga seperti lapangan futsal, toko

sepatu, pakaian, tas, dll tetapi kelompok modal kecil seperti penjahit, sol sepatu, foto copy, warung makan, *laundry*, dan jasa-jasa lain. Kontribusi mahasiswa pada ekonomi daerah dalam laporan Bank Indonesia tahun 2004 menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa tahun 2004 di Yogyakarta ada 240000 mahasiswa dengan rerata setiap mahasiswa membelanjakan Rp 1.000.000;/bulan, maka 240 ribu mahasiswa=240M/bln=2,8 trilyun pertahun dan hanya 4% masuk ke Perguruan Tinggi (untuk membayar SPP, praktikum, dll) selebihnya dibelanjakan terbanyak pada kebutuhan konsumtif.

Tempat belanja konsumtif mendorong meningkatnya jumlah café, rumah makan, pusat perbelanjaan, meningkatnya jumlah pendatang dari plosok Indonesia untuk berbisnis di Yogyakarta, meningkatnya jumlah sepeda motor, meningkatnya bisnis entertainment, amusement (music hall, game center dll), meningkatnya jumlah kunjungan keluarga mahasiswa.

Dampak sebagai kota pendidikan di Yogyakarta melahirkan peluang dan ancaman. Peluang bagi bisnis konsumsi dan ancaman bagi atmosfer pendidikan dan ancaman bagi ketertiban umum. Sebab tidak semua mahasiswa di Yogyakarta mampu menata dirinya menjadi orang sukses, banyak mahasiswa yang gagal dalam pergaulan, gagal studi serta terjerumus dalam dunia gelap lain. Bigron di atas mendorong munculnya empati masyarakat untuk peduli pendidikan, salah satunya Tim Pengerak PKK Kota Yogyakarta yang pada tahun 2002 memiliki program "Gerakan Sapa Anak Kos (GSAK)", pada tahun 2004 program GSAK dikembangkan menjadi Kos Crisis Center (KCC). Proram GSAK dan KCC berupaya menjadi wadah dan media forum komunikasi anak kos agar mampu beradaptasi di Yogyakarta dengan baik dan sukses studi serta mewadahi forum pondokan/pemilik kos dan menjebatani antara anak kos dengan penduduk pribumi. Sebab anak kos sering menghadapi permasalahan adaptasi, pergaulan yang salah, kriminalitas, konflik antar suku, dll.

## **B. Pembahasan**

Kos Crisis Center (KCC) adalah organisasi social kemasyarakatan yang merupakan tindak lanjut dari proram Gerakan Sapa Anak Kos (GSAK) Tim Pengerak PKK Kota Yogyakarta yang dimulai sejak tahun



2002 sampai saat ini. Amiroh (2004:4) KCC menjadi pusat pelayanan informasi, konsultasi dari pendampingan bagi anak kost. Unsur organisasi ini terdiri dari pelajar, mahasiswa Yogyakarta maupun luar daerah.

Visi KCC : berorientasi pada pendidikan, kebudayaan, social dan religius untuk mewujudkan masyarakat Yogyakarta yang beretika dan bermoral pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Misi : a). mempertahankan citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya, pariwisata dan miniature Indonesia dengan menjunjung norma-norma agama., b). mewujudkan kota Yogyakarta sebagai kota yang berhati nyaman, c). wadah untuk mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada pondokan/kos. KCC memiliki beberapa tujuan diantaranya : a). mempertahankan reputasi kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota budaya, b). memberikan informasi tentang pendidikan, sosial, budaya dan kos-kosan di Yogyakarta., c). meningkatkan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, pelajar dan mahasiswa di Yogyakarta., d). memberikan solusi konkrit dalam kehidupan masyarakat kota Yogyakarta khususnya kehidupan anak kost, e). menemukan konsep yang strategis untuk kemajuan dan perkembangan Kota Yogyakarta. Bidang kerja KCC terdiri dari : a). bidang informasi dan komunikasi, b). bidang pendidikan dan pelatihan, c). bidang konsultasi dan pendampingan, f). bidang seni, budaya dan olahraga.

Siapa yang dapat memanfaatkan KCC adalah pelajar, mahasiswa yang berasal dari Yogyakarta maupun dari luar daerah Yogyakarta, induk semang/pemilik kos/pondokan/orang tua pemondok serta warga masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya KCC bermitra dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Poltabes Yogyakarta, Napza crisis center dan forum komunikasi pemilik pondokan/kos disetiap kelurahan dan kecamatan. Atas itu KCC siap diajak berbagi rasa, tempat curhat untuk mencari solusi bersama bagi masyarakat umum yang berminat menyalurkan ide, pemikiran, kreasi ataupun bantuan materi serta bersedia memediasi kepentingan positif dari masyarakat untuk masyarakat. Semua biaya operasional KCC dibebankan pada anggaran Pemerintah Kota melalui berbagai dinas terkait dalam naungan Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta.

Sejak berdiri sampai tahun 2011 aktivitas yang sudah dilakukan oleh KCC antara lain : Deklarasi KCC dan Penerbitan Buku Harian Anak Kos., Roadshow ke 14 Kecamatan dengan acara forum komunikasi antar anak kos dan pemilik pondokan., Menyelenggarakan acara serimonial seperti buka puasa bersama anak kos se-Kota Yogyakarta., Sidak Pondokan secara bertahap., Menyelenggarakan lomba kebersihan dan ketertiban pondokan., Bedah buku harian Anak Kos., Penerbitan Buletin "SAPA" .Menyelenggarakan sarasehan kesehatan reproduksi remaja dan kekerasan dalam pacaran., Menyelenggarakan focus group discussion pemuda Kota Yogyakarta., Reshuffle pengurus KCC., Menyelenggarakan rembug budaya bekerjasama dengan Gayam., Menyelenggarakan bakti pemuda nusantara bekerjasama dengan Kesbangpor., Menyelenggarakan ngabuuburit Asyik Bareng KCC., Pendataan Pondokan se-Kota Yogyakarta. Pelatihan kewirausahaan bidang percetakan dan sablonase bekerjasama dengan asisten Deputy Kader Kewirausahaan Kemenegpora RI., Kemah bakti pemuda nusantara kerjasama dengan Kantor Kesbang POR Kota Yogyakarta., Dialog interaktif remaja Yogyakarta., Menyelenggarakan diskusi Remaja Cerdas : No Free Sex, No Aids., Pelatihan jurnalistik Workshop ESQ., Pelatihan Kader NAPZA dan anjang sana ke PSPP "Pamardi Putra " (Panti Rehabilitasi Narkoba) ., Peninjauan dan pembinaan anjungan asrama Daerah., Menyelenggarakan Workshop Pengembangan Potensi Diri dengan peserta pelajar/mahasiswa, anak kos dan karang taruna., Seminar pembelajaran politik yang cerdas dan santun, Pembinaan rumah pondokan di 14 Kecamatan Se Kota Yogyakarta, Penerbitan buku anak kos, Road show dan silaturahmi ke pondokan., Seminar, kajian dan seresehan serta workshop., Penerbitan bulletin., Bakti social., Lomba antar kos., Konsultasi dan pendampingan.

Walapun kota Yogyakarta di gonjang gempu, pernah ditimpa isu-isu negative dan erupsi merapi sampai saat ini Yogyakarta tetap tegar dengan kota pendidikan sebagai pilar utama identitas. Hal ini membuktikan bahwa Yogyakarta morfologi pendidikan sejak kelahirannya sampai saat ini dan sampai waktu yang tidak terbatas akan selalu memiliki manfaat, E. Durkheim sejak 1893 menegaskan bahwa pendidikan mempunyai tiga fungsi: memperkuat solidaritas

social, memperkuat peranan social dan mempertahankan pembagian kerja. Pendapat ini terbukti oleh masyarakat Yogyakarta, hal ini menjadi sumber melacak keberadaan Kota Yogyakarta dari waktu ke waktu berkaitan dengan proses terbentuknya Yogyakarta sebagai kota pendidikan.

Menurut Sugiyanto (2004 :191) 90% pelaku usaha level mikro semua memberi pelayanan kepada mahasiswa dan pelajar, seperti transportasi, ojek, warung makan, foto copy, toko kelontong, *laundry*, café, warnet, butik, dan berbagai rental serta jasa-jasa layanan lain. Dalam proses pelayanan masyarakat (para pelaku usaha) kepada mahasiswa dan pelajar cenderung dengan sikap jujur, murah, penuh rasa kesungguhan, empati dan memiliki rasa bertanggungjawab serta bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. Sikap masyarakat Yogyakarta yang diseliputi rasa budaya yang tinggi penuh dengan sopan santun dan egaliter membuat para pendatang baru menjadi krasan/betah dan meyebarkannya bahwa hidup di kota Yogyakarta merasa aman, didukung oleh berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah setempat dan harga terjangkau. Sikap dan budaya ini yang mendorong tumbuh kembangnya pelaku urban ke Yogyakarta khususnya generasi muda dan pelaku usaha. Sikap dan budaya masyarakat yang mentradisi halus, *lembah manah*, jujur dan beretika karena pengaruh aura dua kerajaan, dan dua raja tersebut sampai hari ini ditetapkan menjadi pemimpin pemerintahan Yogyakarta.

## **1. Pengaruh Kepemimpinan**

Identitas melintas waktu dan ruang, identitas diri dan pribadi adalah universal sebab dipengaruhi oleh ragam budaya yang unik dan variasi, hal ini menunjukkan bahwa manusia selalu tenggelam dalam social budaya akhirnya membentuk metafisik identitas. Keselarasan individu dan kolektif dalam budaya menjadikan identitas oleh filsafat yang bersumber pada kearifan local. Hal ini menunjukkan identitas sebagai puncak hubungan seseorang dengan orang lain dan mempromosikan cita-cita diri yang berakar pada tradisi. Konsep Diri berbasis kebudayaan merupakan kombinasi dari semangat dan kecerdasan yang terkait erat dengan identitas yang bebas. Teori identitas social, Hogg,1993, Hogg & Abrams, (1988, Tumer, 1991)

Kategori social seperti etnis, gender, afiliasi politik adalah bagian dari masyarakat terstruktur, identitas social pada gilirannya terhubung individu untuk masyarakat, berfikir keanggotaan kelompok mempengaruhi kenyamanan individu, sikap dan perilaku dalam hubungan mereka dengan anggota kelompok lainnya, sehingga teori identitas social menekankan aspek social lebih dari aspek individu. Schlenkerker, 1985 teori identitas sebagai produk intraksi simbolik menjelaskan hubungan antara masyarakat dan individu atas dasar peran, peran mengacu pada fungsi atau bagaimana seseorang melakukan peranya ketika menduduki posisi tertentu dalam kontek social tertentu. Peran seseorang adalah pola perilaku social yang muncul sesuai *expectations* orang lain dan tuntutan dari situasional. Agar lebih matang dan maping yang tepat maka identitas dipelajari dalam arena psikologi, sosiologi dan antropologi, menurut Hecht, 1993 identitas sebagai komulatif, identitas terbentuk, dipertahankan dan dimodifikasi dalam proses komunikatif sumber yang sama menjelaskan identitas pada gilirannya bertindak keluar dan dipertukarkan melalui komunikasi.

Komunikasi identitas Hecht 1993, Menempatkan dua cara dimana komunikasi diinternalisasikan sebagai identitas :1). Makna simbolis dari fenomena social diciptakan dan dipertukarkan melalui interaksi sosial. Identitas terbentuk ketika makna simbolik relevan melekat dan terorganisir dalam individu dalam berbagai situasi melalui interaksi sosial. 2). Ketika individu menempatkan dirinya dalam katagori social dikenali, sebagaimana diyantakan oleh teori identitas social mereka mengkonfirmasi atau memvalidasi melalui interaksi social apakah kategori ini relevan untuk mereka, dan diwujudkan melalui harapan dan motivasi.

Pemimpin Yogyakarta (Gubernur dan wakilnya) adalah seorang pemimpin kerajaan, artinya *double leadership*. Keduanya bukan makhluk social yang hidup dengan serba terbatas dan tertutup tetapi sebaliknya mereka terbuka dan memiliki jaringan yang luas. Sifat keterbukaan dan jaringan ini berkontribusi atas pembentukan identitas kolektif atau atribut kelompok. Jika saya boleh menggambarkan maka kepemimpinan para raja di Yogyakarta mengkonstruksi identitas diri dan masyarakat yang dipimpin juga

mengkonstruksi pemimpinnya menjadi sebuah mata uang logam yang tidak akan memiliki arti jika uang logam tersebut di belah. Artinya kehidupan di Yogyakarta antara pemimpin dan rakyat tidak bisa diberi makna jika harus dipisahkan. Kondisi ini sesuai pendapat (Liversey, 2004) struktur social beranggapan bahwa identitas seseorang adalah produk dari masyarakat, sebaliknya masyarakat juga membentuk individu, sehingga identitas seseorang selalau mengalir dan tidak statis.

Kehidupan masyarakat Yogyakarta dengan pemimpin Raja sekaligus Gubernur dalam bentuk kehidupan kolektif yang masing-masing pihak telah memberikan kerelaan yang diperhitungkan sebagai sebuah pilihan. Hal ini senada dengan teori pertukaran, sebab teori ini menggambarkan bahwa pertukaran merupakan pilihan rasional yang dilandasi perilaku individu dan perilaku kolektif. Perilaku actor dan stakeholder dalam proses kehidupan membentuk lingkungan horizontal, vertical dan diagonal serta dipilih menjadi cermin bagi warganya. Dalam hal ini masing-masing pihak memperoleh *reward*, butuh pengorbanan sebagai *cost* dan mendapat profit non materi atau materi.

## 2. Kesejahteraan Sosial

KCC sebagai *community work* memandang anak kos sebagai asset pasar dalam pandangan liberal dan anak kos dituntut mampu beradaptasi dengan budaya local sebagai bentuk konservatif dalam mewujudkan kesejahteraan social. Berangkat dari dua pandangan yang berlawanan KCC berupaya mengharmoniskan antara pandangan liberal dan konservatif dalam mewujudkan kesejahteraan social anak kos dengan strategi manajemen.

Dalam diskursus kesejahteraan social ditunjukkan bahwa konsep kesejahteraan social dapat dilihat melalui empat aspek, yaitu aspek partisipasi dalam komunitas, aspek penerima layanan usaha kesejahteraan social sebagai warga masyarakat, Peran petugas komunitas untuk mempercepat perubahan dan aspek tanggung-jawab terletak pada pengambil keputusan yang demokratis yang tercermin dalam pengambilan kebijakan yang meliputi desentralisasi, fasilitasi, bentuk struktur dan proses yang berbasis masyarakat.

Charles Zastrow, (2004:12) usaha kesejahteraan social merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan. Untuk mewujudkan kesejahteraan perlu nilai sebagai dasar pembatas antara yang belum dan sudah tercapai dengan batasan nilai, maka Saetarso, (1968 :32-33) nilai adalah kepercayaan, pilihan atau asumsi tentang baik buruk untuk manusia dan Sarah Bank, (2001:6 ) nilai adalah mengungkap dalam kehidupan sehari-hari manusia, nilai dapat berarti agama, politik, prinsip ideologi, keyakinan, atau sikap.

*Community work* adalah suatu proses dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan diri mereka sendiri melalui suatu aktivitas-aktivitas kolektif, KCC sebagai salah satu wujud *community work* yang berjuang untuk mempertahankan reputasi Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan. Dalam kerjanya KCC menerapkan berbagai pendekatan, diantaranya : 1). Pendekatan pelayanan/*self help strategy*, pendekatan yang digunakan *community worker* dalam upaya memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber pelayanan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dalam hal ini KCC menerapkan prinsip bermitra dengan berbagai instansi terkait., 2). Pendekatan pemberian pengaruh/*influence strategy*, pendekatan yang digunakan *community worker* dalam upaya memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah anak kos dan masyarakat dengan memberikan pengaruh atau merubah kebijakan-kebijakan dari organisasi-organisasi pelayanan yang ada di luar masyarakat sendiri. Pengurus KCC sebagai Petugas Sukarela/*unpaid worker*, merupakan petugas yang bekerja dan aktif di masyarakat sebagai kader dan tokoh masyarakat serta bekerja tanpa bayaran. KCC dalam kerjanya memilih terpusat pada proses dengan tujuan intervensi yang lebih berorientasi pada proses, dimana intervensi lebih diarahkan pada upaya meningkatkan kepercayaan, pengetahuan, keterampilan maupun sikap anak kos, masyarakat dan pemerintah setempat., KCC sebagai *Specialist Community Worker* yang menangani permasalahan anak kos khusus/ spesifik yang ada di masyarakat, pemilik pondokan dan masyarakat

lain yang terlibat dalam kehidupan anak kos, pemilik pondokan dan lingkungan sekitar, kerja KCC terfokus untuk kepentingan bersama yang tidak lepas dengan visi, misi dan tujuan. Selanjutnya KCC juga menerapkan *generic community worker*, untuk menangani berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dan bebas untuk bekerja dalam membantu anak kos, pemilik pondokan dan masyarakat untuk mengartikulasikan serta mengupayakan pemenuhan kebutuhannya. Atas itu Ama, (1993), didefinisikan *community work* sebagai metode yang memungkinkan orang (anak kos dan pemilik pondokan) dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya.

### C. Penutup

Sudut pandang sejarah menjadi bukti bahwa peran Kerajaan/kraton dengan model kepemimpinan monarki dan keduanya saling mengisi dan melengkapi dengan visi yang sama membela dan mencerdaskan rakyat. Pihak kerajaan telah memberikan sumbangan dan pemikiran berdirinya beberapa lembaga pendidikan dari yang berjenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Ini sebagai bukti bahwa pemimpin (raja) telah memfasilitasi pengembangan pendidikan, seni dan budaya bagi masyarakat, dengan demikian keraton menjadi pusat studi budaya, kearifan local dan ilmu pengetahuan lainnya, siapapun pemimpin kerajaan telah ditanamkan visi dan misi yang menjadi *value* dan harus ditaati sehingga sampai saat ini Yogyakarta dapat mempertahankan status sebagai kota pendidikan.

Upaya mempertahankan Yogyakarta sebagai kota pendidikan mendapat dukungan dari berbagai organisasi social, politik, ekonomi dll. KCC sebagai salah satu organisasi social yang telah berupaya membantu mewujudkan kesejahteraan para pelajar dan mahasiswa yang berorientasi pada harmonisasi nasionalisme. KCC sebagai organization cultures atau jamak diperkuat oleh Martin bahwa budaya itu bukan tunggal tetapi jamak, ada tiga hal yang menunjukkan jamak tersebut yaitu : 1). Integrasi, pendekatan Homogen, 2). Deferensiasi, tiap group punya budaya berbeda dan 3). Fragmentasi, budaya tidak

bisa dikotak-kotak bukan perspektif tunggal.

Organisasi sebagai Culture : organis memiliki budaya, sebagai variable yang dapat dimanage, dalam kajian tentang budaya yang melembaga pada umumnya organisasi memiliki budaya/variable-variabel yang lain. Budaya berfungsi sebagai variable yang dapat diubah dan diatur untuk meningkatkan performance organisasi, sehingga budaya menjadi over atau tidak menarik. Oleh pimpinan organisasi budaya diciptakan dan dibuat slogan dengan harapan budaya menjadi harapan yang *strong culture*. Ketika terjadi *strong culture* maka implikasi satu keseluruhan organisasi memiliki budaya tunggal yang sangat kuat/strong. Jika budaya tidak kuat maka pengaruhnya terhadap kinerja menjadi buruk (inilah pandangan yang sangat umum dari perpektif manajemen). Budaya harus dilihat dari historis, kalau visi misi organisasi ini menjadi lipstick yang salah maka budaya dapat dikuantitatifkan melalui survey atas itu peran pendiri organisasi menjadi satu-satunya Father yang harus dikuantitatifkan, melalui analisis kuantitatif dengan survey maka budaya menjadi variable yang termanage.

Domain kesejahteraan social menunjukkan konsep "Sosial" dalam makna hubungan antar manusia, dalam hubungan antar manusia akan tercipta "Sistem" dan sistem akan membentuk fungsionalitas sosial. KCC berupaya mencegah terjadinya disfungsionalitas social anak kos dalam kehidupan sehari-hari yang disebabkan banyak hal, ketidak berfungsi sosial menunjukkan ketidakmampuannya melaksanakan peran sosial yang diamanahkan oleh nilai-nilai masyarakat atas itu KCC siap menjadi jembatan antara anak kos dengan masyarakat setempat, lingkungan dan pemilik pondokan dalam proses harmonisasi. Sebab status anak anak kos merupakan status yang banyak diperhitungkan dan dipermasalahan dalam tantangan positif dan negative, Veeger (1992:26), Setiap status akan menimbulkan hak dan kewajiban, hak dan kewajiban (tanggungjawab) disebut sebagai peran/role dan menyangkut perilaku orang.

Fenomena anak kos yang kurang mampu dalam melakukan proses adaptasi sehingga fungsi sosialnya/kapasitas individu kurang terakomodir dan kurang maksimal dalam menyatu dengan



masyarakat local Yogyakarta maupun sesama anak kos, atas itu perlu KCC memaksimalkan anak kos dalam memainkan peran fungsi sosial/ kapasitas anak kos dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. Atas itu KCC menyakini bahwa kesejahteraan social sebagai kegiatan dengan mengembangkan berbagai usaha kesejahteraan sosial. yang dikembangkan untuk membantu, mengembangkan dan mendukung terciptanya peningkatan taraf hidup anak kos, keluarga anak kos maupun masyarakat umum, merupakan inti perwujudkan manajemen kesejahteraan social anak kos di Yogyakarta dalam rangka berkontribusi mempertahankan predikat Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berhati Nyaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sobirin. (2010), Hakekat Identitas Diri : Sebuah Kajian Filosofi dan Psikologis, Fakultas Ekonomi UII.
- Amiroh, (2004:4), Buku Harian Anak Kos, PKK Kota Yogyakarta.
- Bambang Soewondo, (1977), Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
- Charles Zastrow, 2004, *Introduction to Social Work and Social Welfare*, Thomson Higher Education
- Edward A. (1978), "Emile Durkhem" dalam Tom Bottomore & Robert Nisbet, *A History of Sociological Analysis*, New York : basic Books, Inc, 1978
- Gran, G (1983), *Development by people*, New York, Praeger.
- HM. Nasrudinn Anshoriy CH & Zainal Arifin Thoha (2005), *Berguru Pada Jogja Demokrasi dan Kearifan Lokal, "Kutub" Yogyakarta bekerjasama dengan SKH. Kedaulatan Rakyat Yogyakarta.*
- Liversey, C. (2004), *Culture and Identity, sociological Pathway*, available at. <http://www.sociology.org.uk/Pathway2.htm> diakses 30 Oktober 2010.
- Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho D. (2007), *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat.* , PT Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta.
- Santoso, Budi W (2009), *Pendidikan Yogyakarta Pembentuk Karakter Bangsa, Kopertis Wilayah V Yogyakarta.*
- Sapto HP.tt. Nyi Roro Kidul dan Resiko Bencana Tsunami. *Antara News.* Jakarta, <http://webforum.plasa.com/showthread.php?=84892>.
- Sugiyanto, (2004), *Yogyakarta Kota Pendidikan dan Ekonomi Alternatif*, *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta. Edisi XXII. No. 3.
- Sri Sultan HB X (2004):11) dalam *Yogyakarta in Corparated* menyatakan bahwa "Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota budaya dan kota pariwisata".,

Peraturan Pemerintah DIY Nomor 6 Tahun 2003 : Tentang Rencana Strategis Daerah DIY 2004-2008

Supardi (2003:15), Gerakan Yogyakarta kota pendidikan dan taman pintar pendidikan.

Gunawan (2003:11), Yogyakarta sebagai kota pendidikan adalah komitmen stakeholders

APTISI Wilayah V Yogyakarta, "Mempertahankan Yogyakarta sebagai kota pendidikan perlu investasi besar, kebijakan pemerintah bersama DPRD dengan melibatkan sekolah dan kampus".  
Suyanto dalam pidato pengukuhan guru besar, pendidikan sebagai tolak ukur atau indicator.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional